

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan *skimming* ATM berbasis transaksi elektronik di Indonesia dan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi *skimming* ATM berbasis transaksi elektronik. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan penelitian hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. **Hasil** penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan *skimming* ATM dapat ditinjau dari beberapa undang-undang yaitu KUHP yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP, UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu Pasal 30 dan Pasal 32 UU ITE dan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi *skimming* ATM berbasis transaksi elektronik, Indonesia yang menganut Asas *lex specialis derogat legi generalis* merupakan asas yang menjelaskan bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum, tentu saja berlaku pada UU ITE saat Undang-Undang ini berlaku, dan akan mengesampingkan KUHP namun, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikategorikan hukum pidana khusus yang tidak termasuk dalam undang-undang pidana. Aturan-aturan dan ketentuan yang termuat pada pidana materiil undang-undang tersebut menjadikannya hukum yang harus diberlakukan pada prakteknya. Kehadiran undang-undang khusus ini tentu bertujuan memudahkan bagi pihak penegak hukum dan masyarakat agar lebih mudah mencari keadilan dalam prosesnya dan tentu saja karena kejahatan yang diatur dalam undang-undang ITE merupakan kejahatan yang tidak bisa dianggap biasa karena selalu berkembangnya motif akan perubahan zaman yang maju. Pertanggung jawaban akan kerugian yang dialami nasabah dalam kejahatan *skimming* ini akan menjadi tanggung jawab bank dalam penggantian dana nasabah yang hilang, sehingga bank itu sendiri yang tahu bagaimana kerugian yang dapat saja terjadi dikemudian hari tidak terjadi lagi.

Kata kunci : Kebijakan Hukum, *Skimming* (ATM), Transaksi Elektronik

ABSTRACT

The purpose of this study was to identify, understand and analyze the regulation of electronic transaction-based ATM skimming in Indonesia and criminal law policies in tackling electronic transaction-based ATM skimming. This research includes normative juridical research, namely legal research conducted by examining literature or secondary data. The legal research approach that the authors use in this study is the statutory approach, the conceptual approach, the case approach and the comparative approach. The results of the study show that ATM skimming arrangements can be viewed from several laws, namely the Criminal Code, namely Article 363 Paragraph (1) to 5 of the Criminal Code, Law no. 11 of 2008 as amended into Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE), namely Article 30 and Article 32 of the ITE Law and Law no. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes (TPPU) is regulated in Article 2 to Article 5. Criminal law policies in tackling electronic transaction-based ATM skimming, Indonesia which adheres to the principle of *lex specialis derogat legi generalis* is a principle which explains that special law rules out general law, of course it applies to the ITE Law when this Law applies, and will override the Criminal Code however, the Law on Information and Electronic Transactions is categorized as a special criminal law that is not included in the criminal law. The rules and provisions contained in the material punishment of the law make it a law that must be applied in practice. The presence of this special law certainly aims to make it easier for law enforcers and the public to more easily seek justice in the process and of course because the crimes regulated in the ITE law are crimes that cannot be considered normal because the motives for changing times are always developing. . Accountability for losses suffered by customers in this skimming crime will be the responsibility of the bank in replacing lost customer funds, so that the bank itself knows how losses that may occur in the future will not occur again.

Keywords: Legal Policy, Skimming (ATM), Electronic Transactions